

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

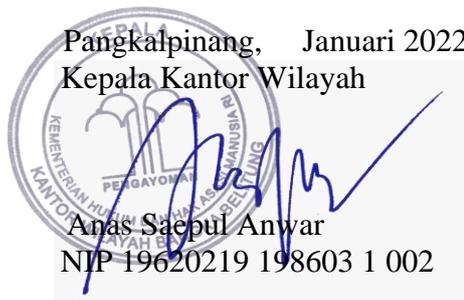
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung – DITJEN PP (649006) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah

Anas Saepul Anwar
NIP 19620219 198603 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEP. BANGKA BELITUNG**

*Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Air Itam –
Pangkalpinang*

Telp. (0717) 439439-439435 Fax (0717) 439435

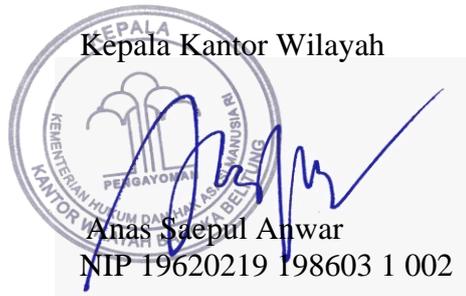
Laman : <http://babel.kemenkumham.go.id>, Email : Kepeg.kemenkumhambabel@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah

The image shows a circular official stamp of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Bangka Belitung. The stamp contains the text 'KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI PANGKALPINANG' and 'KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BANGKA BELITUNG'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Anas Saepul Anwar' and the identification number 'NIP 19620219 198603 1 002' are printed.

Anas Saepul Anwar

NIP 19620219 198603 1 002

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung per 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada semester II Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada semester II TA 2021 adalah sebesar Rp171.926.500 atau mencapai 99,79 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp172.285.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset pada semester II Tahun 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0 ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 0 dan Ekuitas sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode semester II Tahun 2021 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 171.926.500 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 171.926.500. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 171.926.500.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 171.926.500 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 171.926.500,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember **2021** disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk semester II Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEP.
BANGKA BELITUNG (649006)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	172,285,000	171,926,500	99.79	119,285,090
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		172,285,000	171,926,500	99.79	119,285,090

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEP.
BANGKA BELITUNG (649006)**

NERACA

PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEP.
BANGKA BELITUNG (649006)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	64,341,500	48,062,295
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	107,585,000	71,222,795
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		171,926,500	119,285,090
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(171,926,500)	(119,285,090)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(171,926,500)	(119,285,090)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(171,926,500)	(119,285,090)

Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEP.
BANGKA BELITUNG (649006)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021
EKUITAS AWAL	E.1	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(171,926,500)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-
JUMLAH		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	171,926,500
EKUITAS AKHIR	E.5	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM R.I. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Jalan Pulau Bangka Air Itam Pangkalpinang-Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem

akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kep. Bangka Belitung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak	50%

	dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung (649006) mengadakan 2 (Dua) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
PNBP	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	172,285,000	172,285,000
Belanja Modal	0	-
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	172,285,000	172,285,000

Realisasi

Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk semester II yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember **2020** adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Realisasi Belanja

Negara

Rp171.926.500

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada semester II Tahun 2021 adalah sebesar *Rp171.926.500* atau **99,79%** dari anggaran belanja sebesar 172.285.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA2021

Uraian	Semester II 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	172,285,000	171,926,500	99.79
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan	-	-	-
Total Belanja Kc	172,285,000	171,926,500	99.79
Pengembalian	-	-	-

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	171,926,500	119,285,090	44.13
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	171,926,500	119,285,090	44.13

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp171.926.500

Realisasi Belanja Barang untuk semester II yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp171.926.500* dan *Rp119.285.090*. Realisasi Belanja Barang TA2020 mengalami **kenaikan 44,13%** dari Realisasi Belanja Barang TA2021.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI PER 31 Des 2021	REALISASI PER 31 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,610,000	750,000	
Belanja Bahan	58,732,500		
Belanja Jasa Profesi			#DIV/0!
Belanja Sewa			#DIV/0!
Belanja Perjalanan Biasa	102,485,000	70,922,795	44.50
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	5,100,000	300,000	1,600.00
Belanja Honor Output Kegiatan			
Belanja Bahan		43,107,295	(100.00)
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	3,999,000	1,155,000	
Belanja Jasa Profesi		3,050,000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	171,926,500	119,285,090	44.13
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	171,926,500	119,285,090	44.13

B.4.1 Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19

Realisasi Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19 untuk semester II yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar sebesar **Rp.3.999.000** dan Rp1.155.000.

Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep.BangkaBelitung (649006) terdapat realisasi belanja covid untuk periode Semester II 2021 sebesar **Rp.3.999.000**, yang berupa : Antigen yang dilakukan untuk perjalanan dinas.Akun khusus Covid yang digunakan adalah 522192

RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
SEMESTER II TA 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	Nomor SPM	TANGGAL SPM
1	649006	Kanwil Kemenkumham Babel Ditjen PP	522192	210151303000438	Rp 400.000	SWAB ANTIGEN	00003	23-Mar-21
2	649006	Kanwil Kemenkumham Babel Ditjen PP	522192	210151303000636	Rp 600.000	SWAB ANTIGEN	00005	15-Apr-21
3	649006	Kanwil Kemenkumham Babel Ditjen PP	522192	210151303000862	Rp 600.000	SWAB ANTIGEN	00007	06-Mei-21
4	649006	Kanwil Kemenkumham Babel Ditjen PP	522192	210151303001223	Rp 800.000	SWAB ANTIGEN	00009	14-Jun-21
5	649006	Kanwil Kemenkumham Babel Ditjen PP	522192	210151303001338	Rp 720.000	SWAB ANTIGEN	00010	28-Jun-21
6	649006	Kanwil Kemenkumham Babel Ditjen PP	522192	210151701000104	Rp 879.000	SWAB ANTIGEN	00016	02-Des-21
TOTAL					Rp 3.999.000			

*Perbandingan Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19 Per
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31Des 2021	REALISASI PER 31 Des 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid	3.999.000	1.155.000	246,23
Jumlah Belanja Kotor	3.999.000	1.155.000	246,23
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3.999.000	1.155.000	246,23

Belanja Modal

Rp0

B.5 Belanja Modal

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal

Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember

2021 dan 31 Desember 2020 .

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

URAIAN	REALISASI PER 31 Des 2021	REALISASI PER 31 DESEMBER 2020	NA (TURU
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	#DIV

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember

2021 dan 31 Desember 2020 . Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0</i>	C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 . yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.
<i>Kas di Bendahara Penerimaan Rp0</i>	C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<i>Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0</i>	C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
<i>Piutang PNB Rp0</i>	C.4 Piutang PNB Tidak terdapat Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .

<i>Bagian Lancar TPA Rp0</i>	C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tidak terdapat Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0</i>	C. 7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Tidak terdapat Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.
<i>Belanja Dibayar di Muka Rp0</i>	C.8 Belanja Dibayar di Muka Tidak terdapat Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
<i>Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0</i>	C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Persediaan Rp0</i>	C.10 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar.
<i>Tagihan TP/TGR Rp0</i>	C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tidak terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.
<i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	C.12 Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Penyisihan</i>	C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

<i>Piutang Tak Tertagih – Piutang Panjang Rp0</i>	Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.
<i>Tanah Rp0</i>	C.14 Tanah Tidak terdapat Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Peralatan dan Mesin Rp0</i>	C.15 Peralatan dan Mesin Tidak terdapat Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.
<i>Gedung dan Bangunan Rp0</i>	C.16 Gedung dan Bangunan Tidak terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0</i>	C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tidak terdapat Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Aset Tetap Lainnya Rp0</i>	C.18 Aset Tetap Lainnya Tidak terdapat Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	

<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0</i>	C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tidak terdapat Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0</i>	C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Aset Tak Berwujud Rp0</i>	C.21 Aset Tak Berwujud Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
<i>Aset Lain-Lain Rp0</i>	C.22 Aset Lain-Lain Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0</i>	C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
<i>Uang Muka dari KPPN Rp0</i>	C.24 Uang Muka dari KPPN Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021

dan 31 Desember 2020 .

<i>Utang kepada Pihak Ketiga Rp0</i>	C.25 Utang kepada Pihak Ketiga Tidak terdapat Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.
<i>Pendapatan Diterima di Muka Rp0</i>	C.26 Pendapatan Diterima di Muka Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
<i>Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0</i>	C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .
<i>Ekuitas Rp0</i>	C.28 Ekuitas Tidak terdapat Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 .

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per **31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020** adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Pegawai
Rp0*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban
Persediaan Rp0*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31
Desember 2020*

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.64.341.500*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp.64.341.500* dan *Rp.48.062.295*. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban

yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	58,732,500	43,107,295	36.25
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,610,000	750,000	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Sewa	-	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	-	3,050,000	-
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	3,999,000	1,155,000	-
Jumlah	64,341,500	48,062,295	33.87

Beban Pemeliharaan Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Perjalanan Dinas Rp107.585.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp107.585.000* dan *Rp71.222.795*. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	
Beban Perjalanan Biasa	102,485,000	70,922,795	44.50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,100,000	300,000	1600.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	107,585,000	71,222,795	51.05

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali

entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp171.926.500

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar *Rp171.926.500* dan *Rp119.285.09*

Penyesuaian

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada

Rp0 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain- **E.3.5 Koreksi Lain-Lain**

Lain Rp0 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar *Rp171.926.500*

90 dan *Rp119.285.090* Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	171,926,500
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	171,926,500

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**

Rp0 Nilai Ekuitas pada tanggal **31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020** adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F. 1.KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian- kejadian penting setelah tanggal neraca